

# REFERENSI

No. 04/ref.PKA/APBN/IX/2021

Perkembangan Indikator  
Pendidikan Sebagai Dukungan PN 3:  
Peningkatan SDM Berkualitas dan  
Berdaya Saing

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

**BADAN KEAHLIAN – SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



# PERKEMBANGAN INDIKATOR PENDIDIKAN SEBAGAI DUKUNGAN PN 3: PENINGKATAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Damia Liana dan Nadya Ahda

## I. Pendahuluan

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2022, yaitu tertuang menjadi Prioritas Nasional (PN) 3 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022. Salah satu sasaran yang akan dituju oleh pelaksanaan PN 3 adalah terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan, yang diukur dengan 3 indikator, yaitu nilai rata-rata hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA), rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah. Untuk mewujudkan PN 3 tersebut, terdapat beberapa Program Prioritas (PP) yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya ialah PP 4 tentang Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas yang diukur dengan beberapa indikator, seperti rasio Angka Partisipasi Kasar (APK), tes PISA, tingkat penyelesaian pendidikan, partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan APK Pendidikan Tinggi (PT). Secara garis besar, beberapa indikator pendidikan yang ingin dicapai oleh pemerintah di tahun 2022 diringkas pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Indikator Pendidikan dalam RKP 2022

No.	Sasaran/Indikator Pendidikan	Target 2022
<b>Terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan</b>		
<b>Nilai rata-rata hasil PISA:</b>		
1.	A. Membaca (nilai)	394
	B. Matematika (nilai)	385
	C. Sains (nilai)	399
2.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,13
3.	Harapan lama sekolah (tahun)	13,57
<b>PP 4. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas</b>		
<b>Rasio APK 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)</b>		
4.	A. SMA/SMK/MA sederajat	0,81
	B. PT	0,24
<b>Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%)</b>		
5.	A. Membaca	33
	B. Matematika	30
	C. Sains	42,60
<b>Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%):</b>		
6.	A. Literasi	59,20
	B. Numerasi	28,30
<b>Tingkat penyelesaian pendidikan (%):</b>		
7.	A. SD/MI/ sederajat	97,93
	B. SMP/MTs/ sederajat	90,54
	C. SMA/SMK/MA/ sederajat	69,08
8.	Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti PAUD (%)	69,63
9.	APK PT (%)	31,52

Sumber: RKP 2021

Tulisan ini kemudian bertujuan untuk memberikan referensi mengenai perkembangan berbagai indikator pendidikan selama beberapa tahun terakhir, baik indikator dalam RKP 2022 maupun indikator lainnya yang dapat menjadi komplementer. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat memberi gambaran sejauh mana pemerintah harus mengupayakan strategi kebijakannya, sehingga target indikator pendidikan tahun 2022 di atas kemudian dapat tercapai.

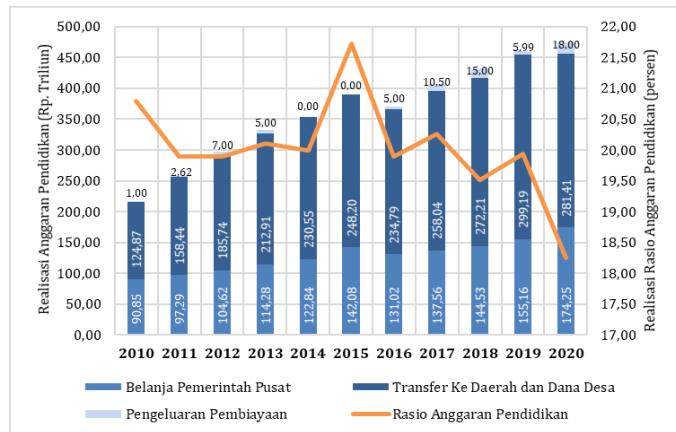
## II. Perkembangan Anggaran Pendidikan

Selama 1 dekade terakhir, secara umum realisasi anggaran pendidikan terus menunjukkan tren peningkatan (Gambar 1). Anggaran pendidikan total yang direalisasikan pada tahun 2010 yang sebesar Rp216,72 triliun kemudian meningkat cukup signifikan menjadi Rp473,66 triliun pada tahun 2020, atau meningkat lebih dari 2 kali lipat. Tren peningkatan ini pun diikuti oleh komponen anggaran pendidikan baik melalui belanja pemerintah pusat (dengan rata-rata laju pertumbuhan tahunan 6,89

persen) maupun melalui transfer ke daerah dan dana desa/TKDD (dengan rata-rata laju pertumbuhan tahunan 8,86 persen)<sup>1</sup>. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan secara garis besar juga mengalami peningkatan, kecuali untuk tahun 2014 dan 2015 yang sempat nihil. Peningkatan realisasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan ini semakin didukung dengan adanya dana abadi penelitian dan dana abadi perguruan tinggi, terutama sejak tahun 2019. Kemudian, meskipun alokasi anggaran selalu diupayakan memenuhi *mandatory spending* 20 persen dari APBN sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1), namun realisasinya tidak selalu memenuhi rasio 20 persen. Hal ini pun terlihat dari rasio realisasi anggaran pendidikan terhadap total belanja, terutama selama 3 tahun terakhir, yang selalu di bawah 20 persen (Gambar 1).

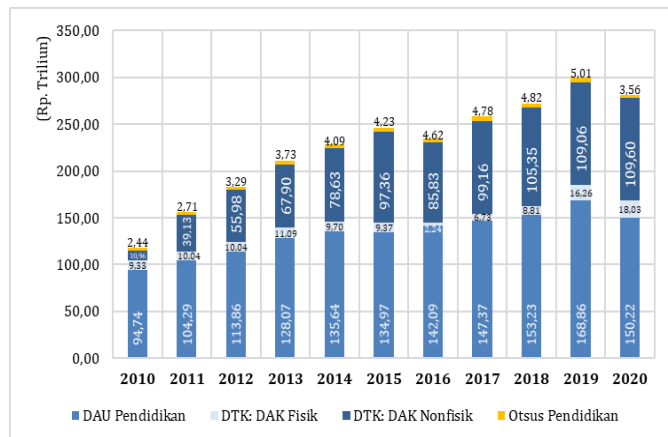
Peningkatan anggaran pendidikan melalui TKDD selama 1 dekade terakhir juga didukung oleh peningkatan anggaran yang cukup konsisten terutama pada pos Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan, dan Dana Transfer Khusus (DTK): Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik (Gambar 2). Rata-rata laju pertumbuhan tahunan untuk realisasi DAU Pendidikan selama 1 dekade terakhir tercatat sebesar 4,93 persen, untuk Otsus Pendidikan sebesar 4,74 persen, DAK Fisik

**Gambar 1.** Perkembangan Realisasi Anggaran Pendidikan Beserta Rincian dalam APBN 2010-2020



Sumber: Kementerian Keuangan, 2010-2020 (diolah)

**Gambar 2.** Perkembangan Realisasi Anggaran Pendidikan Melalui TKDD 2010-2020



Sumber: Kementerian Keuangan, 2010-2020 (diolah)

<sup>1</sup> Meskipun secara umum tren realisasi anggaran pendidikan meningkat selama 1 dekade terakhir, namun terkhusus pada tahun 2016, terjadi penurunan realisasi anggaran pendidikan sebesar 4,99 persen. Penurunan ini juga dialami oleh anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, yaitu terkontraksi sebesar 7,78 persen dan anggaran pendidikan melalui TKDD yang terkontraksi sebesar 5,40 persen. Meskipun alokasi anggaran pendidikan total naik di tahun 2016, namun untuk alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat justru turun, dari Rp155,06 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp143,05 triliun. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran fungsi pendidikan yang bersifat kebutuhan daerah dimasukkan dalam anggaran transfer daerah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud, 2015). Namun realisasi anggaran pendidikan melalui TKDD sendiri justru juga terkontraksi di tahun ini, yaitu DAK Fisik terkontraksi -76,08 persen dan DAK Nonfisik terkontraksi -11,84 persen.

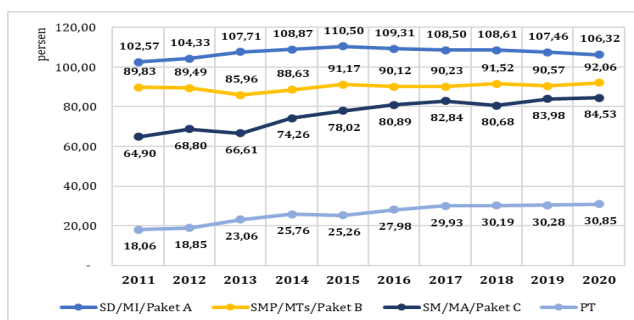


sebesar 25,26 persen, dan DAK Nonfisik sebesar 37,49 persen<sup>2</sup>. Namun untuk tahun 2020, beberapa pos anggaran pendidikan melalui TKDD mengalami kontraksi, seperti DAU Pendidikan (-11,04 persen) dan Otsus Pendidikan (-28,95 persen). Untuk DAK Nonfisik, pos Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru (DTPG) PNSD, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi pos yang mendominasi DAK Nonfisik selama 1 dekade terakhir. Namun, semenjak tahun 2016-2017, beberapa pos lain dari DAK Nonfisik, seperti Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD), Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan, serta Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus mulai terealisasi. Kemudian mulai tahun 2019, beberapa pos lain dari DAK Nonfisik juga mulai direalisasikan, seperti Bantuan Operasional Kesetaraan serta Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya.

### III. Perkembangan Indikator Pencapaian Pendidikan

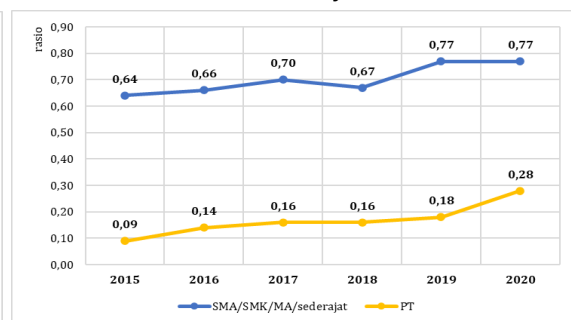
Selama 1 dekade terakhir, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan tren yang berbeda (Gambar 3). Misalnya untuk jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, tren APK menunjukkan kurva *inverted-U*, dimana selama periode 2011-2015 tren meningkat, dan sebaliknya, 2016-2020 tren cenderung menurun. Pada tahun 2020, APK SD/MI/Paket A menurun menjadi 106,32 persen, yang artinya persentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah SD/MI/Paket A di tahun 2020 turun menjadi 106,32 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, tren APK cenderung lebih fluktuatif. Untuk tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/Paket B menjadi 92,06 persen. Untuk jenjang pendidikan SM/MA/Paket C, trennya cenderung meningkat meskipun relatif landai. Seperti pada jenjang pendidikan SMP sederajat, partisipasi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SM/MA/Paket C juga meningkat menjadi 84,53 persen di tahun 2020. Sementara untuk PT, tren peningkatan relatif lebih konstan, dengan peningkatan partisipasi penduduk usia 19-24 tahun yang mengenyam PT menjadi 30,85 persen. Perlu diketahui bahwa APK jenjang pendidikan PT ditargetkan secara khusus dalam RKP 2022, yaitu dengan target peningkatan APK PT yang cukup signifikan, yaitu menjadi 31,52 persen di tahun 2022.

**Gambar 3.** Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Formal dan Nonformal 2011-2020



Sumber: BPS, 2020

**Gambar 4.** Rasio APK 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya 2015-2020



Sumber: BPS, 2020 (diolah)

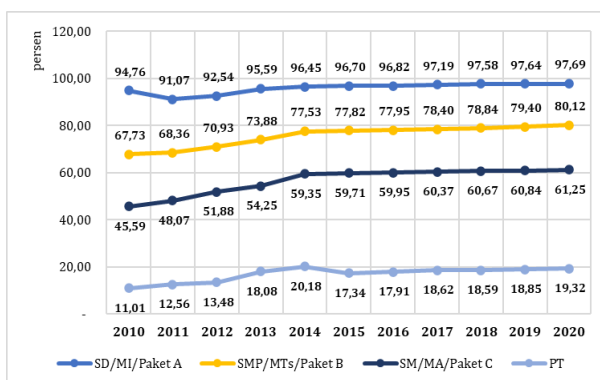
<sup>2</sup> Meskipun rata-rata laju pertumbuhan tahunan tinggi, namun DAK Fisik sempat berkontraksi selama 3 tahun berturut-turut (2014-2016).

Berbicara soal target RKP 2022, terdapat target lain dalam RKP 2022 yang berkaitan dengan APK, yaitu rasio APK 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat dan PT, yang ditunjukkan oleh Gambar 4. Selama 2015-2020, secara umum terdapat tren peningkatan rasio APK antara 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya, baik untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat maupun PT. Untuk tahun 2020, kenaikan rasio APK untuk jenjang PT didukung oleh kenaikan APK dari 20 persen termiskin dari 11,44 persen (2019) menjadi 16,13 persen (2020), sementara untuk APK 20 persen terkaya justru turun, dari 62,14 persen (2019) menjadi 56,87 persen (2020). Sementara untuk rasio APK jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat, relatif tidak berubah pada rasio 0,77. Hal ini disebabkan karena adanya stagnasi APK dari 20 persen termiskin dan kenaikan yang tidak terlalu signifikan dari APK 20 persen terkaya. Dalam RKP 2022, pemerintah menargetkan adanya peningkatan rasio APK antara 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/ sederajat menjadi 0,81, sementara untuk jenjang PT justru ada target penurunan dari realisasi tahun 2020, yaitu menjadi 0,24.

Selain APK, indikator pendidikan lain yang juga digunakan adalah Angka Partisipasi Murni (APM), sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5. Selama 1 dekade terakhir, APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A terus mengalami peningkatan, terutama sejak tahun 2011. Untuk tahun 2020, terdapat peningkatan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah tepat waktu di jenjang SD/MI/Paket A menjadi 97,69 persen. Sementara untuk jenjang SMP/MTs/Paket B, trennya juga meningkat, meskipun *slope*-nya menjadi lebih landai di periode 2014-2020. Di tahun 2020, sebanyak 80,12 persen penduduk usia 13-15 tahun mengenyam pendidikan jenjang SMP/MTs/Paket B dengan tepat waktu. Kemudian untuk jenjang SM/MA/Paket C, trennya pun lebih landai di periode 2014-2020. Di tahun 2020, terdapat peningkatan proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah tepat waktu di jenjang SM/MA/Paket C, yaitu menjadi 61,25 persen. Untuk PT, trennya juga relatif meningkat selama 1 dekade terakhir, dengan persentase jumlah penduduk usia 19-24 tahun yang mengenyam PT tepat waktu sebesar 19,32 persen.

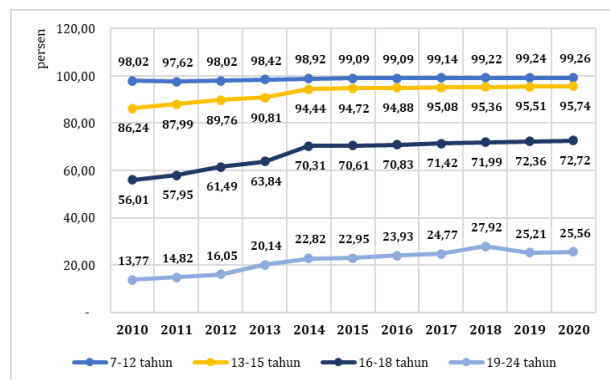
Selain APK dan APM, indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga sering digunakan, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 6. Selama 1 dekade terakhir, APS

**Gambar 5.** Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Formal dan Nonformal 2010-2020



Sumber: BPS, 2020

**Gambar 6.** Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Formal dan Nonformal 2010-2020



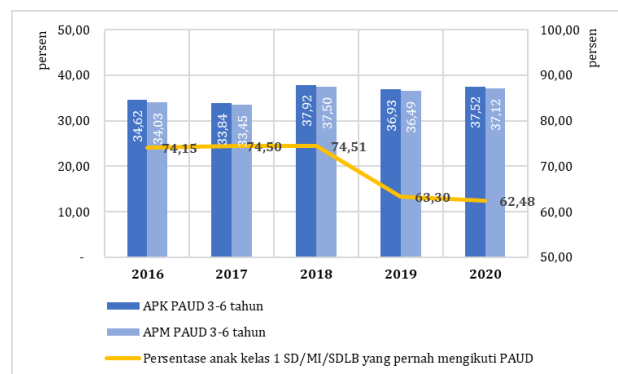
Sumber: BPS, 2020

untuk kelompok usia 7-12 tahun meningkat, terutama sejak tahun 2011, namun *slope*-nya juga cenderung landai sejak tahun 2014. Di tahun 2020, terdapat 99,26 persen penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah. Tren yang sama ditunjukkan oleh APS kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun, dengan pencapaian 95,74 persen dari penduduk usia 13-15 tahun di tahun 2020 sedang bersekolah dan 72,72 persen dari penduduk usia 16-18 tahun di tahun 2020 pun sedang bersekolah. Kemudian untuk APS kelompok usia 19-24 tahun, trennya pun tidak jauh berbeda, dengan proporsi 25,56 persen dari penduduk usia 19-24 tahun sedang bersekolah di tahun 2020.

Untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), secara umum pergerakan kinerja APK dan APM PAUD menunjukkan tren yang sama, yaitu cenderung naik-turun selama 2016-2020 (Gambar 7). Untuk tahun 2020, sebanyak 37,52 persen dari penduduk usia 3-6 tahun bersekolah di jenjang PAUD dan sebanyak 37,12 persen dari kelompok penduduk tersebut yang bersekolah di jenjang PAUD dengan tepat waktu. Di RKP 2022, terdapat target lain yang akan dituju oleh pemerintah, yaitu persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti PAUD. Menurut BPS, indikator ini juga bisa disebut dengan Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Selama 5 tahun terakhir, trennya cenderung menurun. Untuk tahun 2020, hanya 62,48 persen dari anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti PAUD, mengindikasikan tingkat kesiapan sekolah dari anak-anak SD di Indonesia yang masih relatif rendah. Sementara dalam RKP 2022, pemerintah menargetkan adanya peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator ini, yaitu dengan 69,63 persen dari anak kelas 1 SD/MI/SDLB pernah mengikuti PAUD.

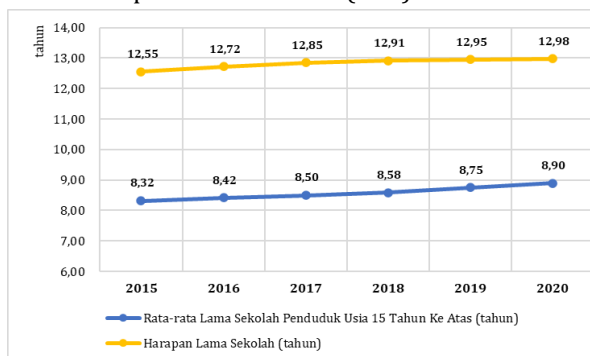
Untuk indikator lain yang salah satunya memiliki fungsi evaluasi program wajib belajar, yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk penduduk usia 15 tahun ke atas, juga

**Gambar 7.** APK, APM, dan Persentase Anak Kelas 1 SD/MI/SDLB Pernah Mengikuti PAUD (AKS) 2016-2020



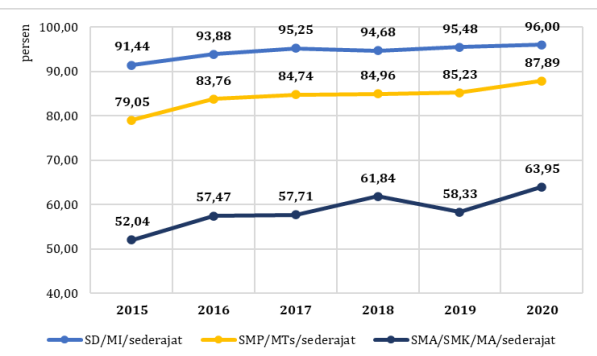
Sumber: BPS, 2020 dan SUSENAS dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPP&PA), 2016-2020

**Gambar 8.** Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 2015-2020



Sumber: BPS, 2020

**Gambar 9.** Tingkat Penyelesaian Pendidikan 2015-2020



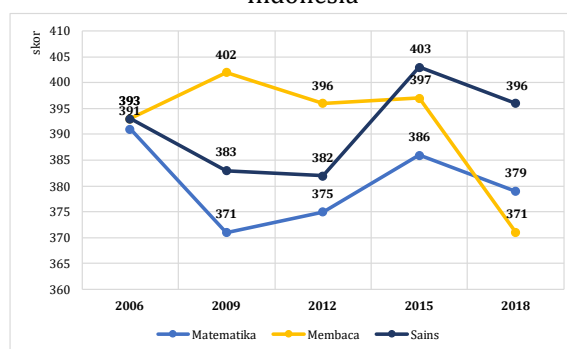
Sumber: BPS, 2021

menunjukkan tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir (Gambar 8). Secara umum, rata-rata penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas bersekolah selama hampir 9 tahun, atau dapat dikatakan hampir menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Untuk tahun 2022, pemerintah menargetkan penduduk usia 15 tahun ke atas dapat benar-benar menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/ sederajat, yang dicerminkan dengan target RLS sebesar 9,13 tahun. Sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS), tren peningkatan selama beberapa tahun terakhir juga ditunjukkan oleh indikator ini (Gambar 8). Untuk tahun 2020, dapat dikatakan bahwa secara rata-rata, anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun tersebut memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,98 tahun atau hampir setara dengan menyelesaikan Diploma I. Sementara dalam RKP 2022, pemerintah menargetkan adanya peningkatan HLS menjadi 13,57 tahun, atau hampir setara dengan menyelesaikan Diploma II.

Selanjutnya, untuk tingkat penyelesaian pendidikan, secara umum seluruh jenjang pendidikan, baik dari SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat juga menunjukkan tren peningkatan (Gambar 9). Untuk tahun 2020, sebanyak 96 persen dari anak-anak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SD/ MI/ sederajat, sebanyak 87,89 persen dari anak-anak dan remaja mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/ MTs/ sederajat, serta sebanyak 63,95 persen remaja mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SMA/ SMK/ MA/ sederajat sesuai dengan rentang usianya, atau dengan tepat waktu. Masih adanya *gap* tingkat penyelesaian pendidikan, terutama untuk jenjang SMA/ SMK/ MA/ sederajat, mengindikasikan masih cukup tingginya tingkat putus sekolah, tinggal kelas, rendahnya angka partisipasi, atau kombinasi di antaranya. Sementara untuk tahun 2022, ditargetkan 97,93 persen anak-anak mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SD/ MI/ sederajat, 90,54 persen anak dan remaja mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SMP/ MTs/ sederajat, serta 69,08 remaja mampu menyelesaikan jenjang pendidikan SMA/ SMK/ MA/ sederajat sesuai dengan rentang usianya.

Selain penting untuk membahas pencapaian pendidikan dari segi aksesibilitas, yang tidak kalah penting dan juga krusial adalah mengenai pencapaian pendidikan dari segi kualitas pembelajaran. Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah pencapaian skor PISA yang dirilis oleh *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), dimana skor ini mencerminkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan membaca, matematika, dan sains dari anak usia 15 tahun. Namun sayangnya, untuk indikator kualitas tidak menunjukkan tren yang sebaik sebagaimana indikator aksesibilitas di atas. Tren penurunan yang tajam terjadi pada subjek membaca sejak tahun 2009, terutama pada 2 periode pengukuran terakhir (Gambar 10). Selain itu, untuk subjek matematika dan sains pun juga mengalami tren penurunan pada periode yang sama, meskipun antara

**Gambar 10.** Perkembangan Skor PISA Indonesia



Sumber: OECD, 2018

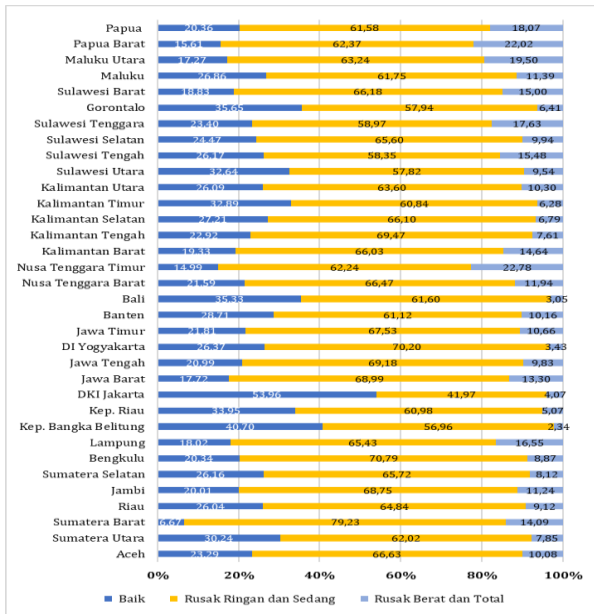


periode pengukuran 2012-2015 sempat menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan aksesibilitas pendidikan di Indonesia selama 1 dekade terakhir tidak dapat diimbangi dengan perbaikan kualitas pembelajaran. Tidak hanya itu, apabila dilihat dari proporsi anak yang mampu mencetak skor pada kompetensi minimal ke atas (mencapai minimal level 2 dari 6 level) juga masih relatif kecil. Berdasarkan laporan PISA 2018, hanya 30,10 persen anak Indonesia yang mampu mencetak skor pada kompetensi minimal ke atas di subjek membaca. Sementara untuk subjek matematika, hanya sekitar 28,10 persennya saja. Meskipun tren skor cenderung menurun selama 2 periode terakhir, namun ternyata lebih banyak anak Indonesia yang mampu mencetak skor pada kompetensi minimal ke atas untuk subjek sains, yaitu sebesar 40 persen. Masih besarnya *gap* proporsi anak dengan skor di bawah kompetensi minimal juga kemudian mengindikasikan masih relatif rendahnya kemampuan rata-rata anak Indonesia di ketiga subjek di atas. Untuk tahun 2022, pemerintah menargetkan adanya perbaikan skor PISA, yaitu untuk subjek membaca menjadi 394, matematika menjadi 385, dan sains menjadi 399. Selain itu, masih di tahun 2022, diharapkan 33 persen anak Indonesia mampu mencetak skor di atas batas minimal kompetensi untuk subjek membaca, 30 persen untuk matematika, dan 42,60 persen untuk sains.

Selain pengukuran pada ketiga subjek di atas, indikator Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) juga pernah mengukur kemampuan literasi dan numerasi yang dapat menggambarkan kualitas pembelajaran melalui pengukuran kompetensi dasar dari siswa-siswi di Indonesia. Untuk AKSI pada tahun 2016, hanya 53,20 persen anak Indonesia yang mampu mencetak skor di atas kompetensi minimal pada subjek literasi (RKP 2022). Bahkan untuk subjek numerasi, tidak sampai 23 persen anak Indonesia yang mampu mencetak skor di atas kompetensi minimal. Senada dengan pencapaian PISA di atas, hal ini mengindikasikan masih relatif rendahnya kemampuan rata-rata anak Indonesia di kedua subjek ini. Dalam RKP 2022 sendiri, pemerintah menargetkan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada proporsi anak Indonesia yang mampu mencetak skor di atas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi, yaitu menjadi sebesar 59,20 persen untuk subjek literasi dan 28,30 persen untuk subjek numerasi.

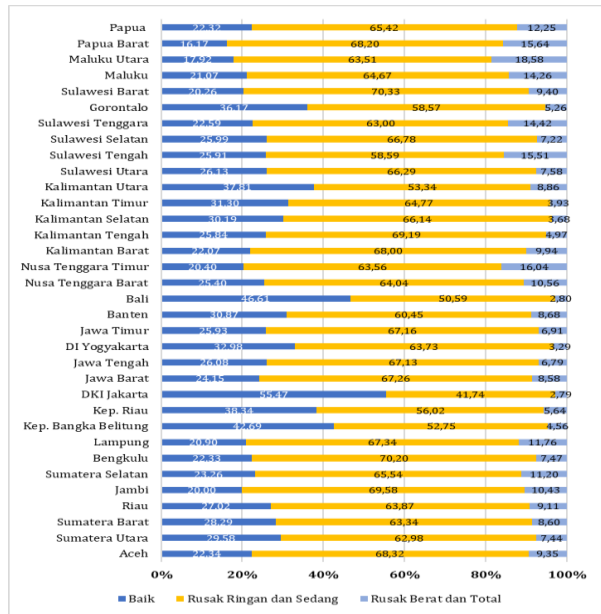
Meskipun tidak secara eksplisit ditargetkan dalam RKP, perkembangan kondisi sarana-prasarana (sarpras) pendidikan masih menjadi indikator pendidikan yang sangat penting untuk mendukung perbaikan indikator aksesibilitas dan kualitas pembelajaran di Indonesia. Misalnya, untuk indikator kondisi ruang kelas sebagai sarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar dapat berlangsung secara kondusif, serta untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Secara garis besar, pada tahun 2016 kondisi ruang kelas dengan kondisi baik berkisar antara 20-30 persen pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Kemudian, jika dilihat dari persebarannya, rata-rata ruang kelas dengan kondisi baik di Pulau Jawa dan Bali memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, yaitu sebesar 29,27 untuk jenjang SD dan 34,58 untuk jenjang SMP (Gambar 11 dan Gambar 12). Sedangkan kondisi baik ruang kelas di Pulau Sumatera memiliki rata-rata sebesar 24,54 untuk jenjang SD dan 27,48 untuk jenjang SMP.

**Gambar 11.** Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD Per Provinsi Tahun 2016



Sumber: Kemendikbud, 2016

**Gambar 12.** Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SMP Per Provinsi Tahun 2016

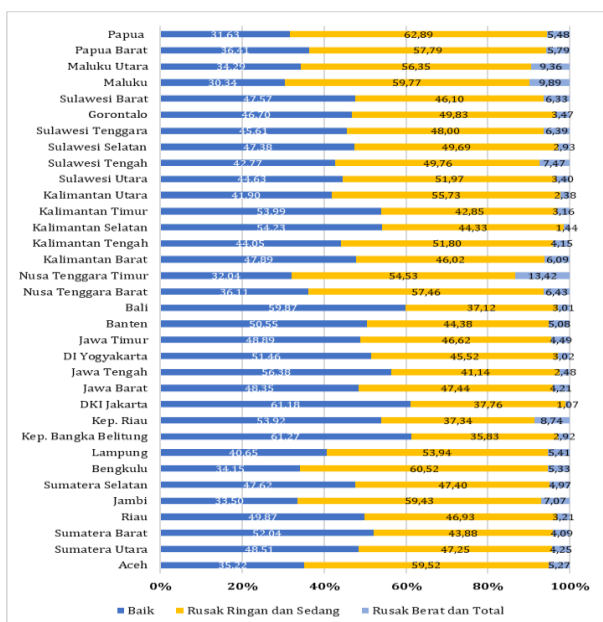


Sumber: Kemendikbud, 2016

Sementara untuk Pulau Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kondisi baik ruang kelas rata-rata hanya sebesar 23,90 untuk jenjang SD dan 25,15 untuk jenjang SMP.

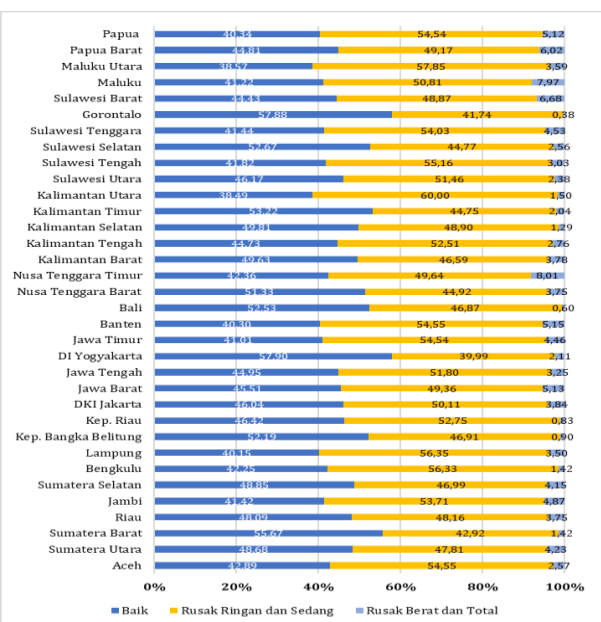
Untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, rata-rata kelas dengan kondisi baik berkisar pada angka 40 persen. Ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang SMA di Pulau Jawa dan Bali bahkan rata-rata mencapai 53,81 persen (Gambar 13). Sementara di Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan dan KTI, ruang kelas dengan kondisi baik masing-masing baru mencapai rata-rata 45,68 persen dan 42,21 persen. Sedangkan untuk jenjang SMK, ruang kelas dengan kondisi baik masih berada di bawah 50 persen yaitu sebesar

**Gambar 13.** Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SMA Per Provinsi Tahun 2016



Sumber: Kemendikbud, 2016

**Gambar 14.** Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SMK Per Provinsi Tahun 2016

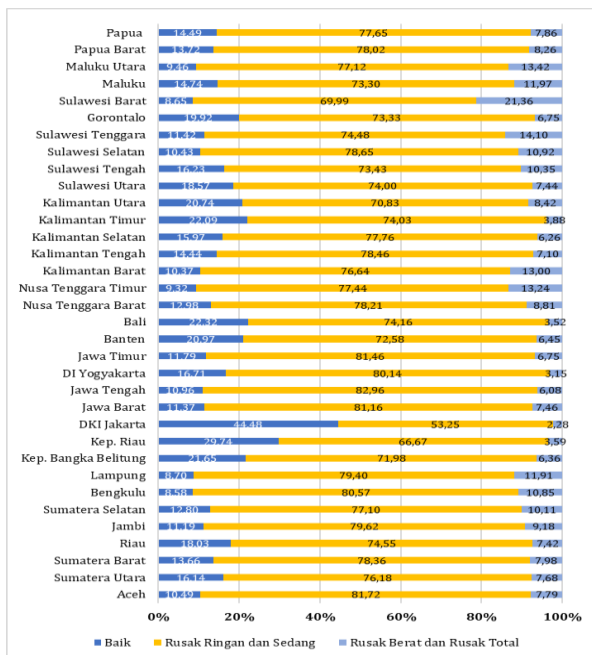


Sumber: Kemendikbud, 2016

46,89 persen untuk Pulau Jawa dan Bali, 46,69 persen untuk Pulau Sumatera, dan 45,82 persen untuk Pulau Kalimantan dan KTI (Gambar 14).

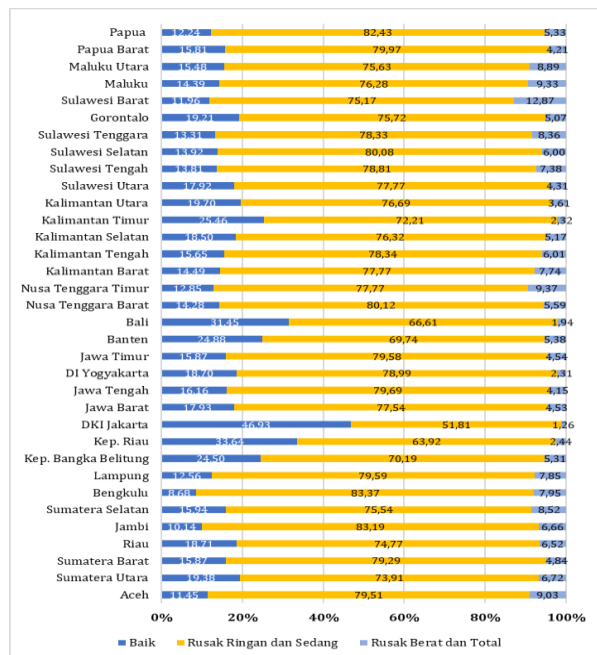
Selanjutnya, lebih dari setengah ruang kelas memiliki kondisi rusak ringan/ sedang untuk semua jenjang pendidikan. Rata-rata ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/ sedang pada Pulau Jawa dan Bali mencapai 62,94 persen untuk jenjang SD, 59,72 persen untuk jenjang SMP, 45,85 persen untuk jenjang SMA, dan 50,06 persen untuk jenjang SMK (Gambar 11-14). Sedangkan untuk Pulau Sumatera, ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/ sedang memiliki rata-rata lebih besar dibandingkan Pulau Jawa dan Bali, yaitu sebesar 66,14 persen untuk jenjang SD, 63,99 persen untuk jenjang SMP, dan untuk jenjang SMA dan SMK masing-masing sebesar 49,2 persen dan 50,65. Sementara rata-rata untuk kondisi rusak berat/ total cenderung lebih kecil, yaitu sebesar 10,98 persen untuk jenjang SD, 8,93 persen untuk jenjang SMP, 5,06 persen untuk jenjang SMA, dan 3,46 persen untuk jenjang SMK.

**Gambar 15.** Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SD Per Provinsi Tahun 2020



Sumber: Kemendikbud, 2020

**Gambar 16.** Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SMP Per Provinsi Tahun 2020

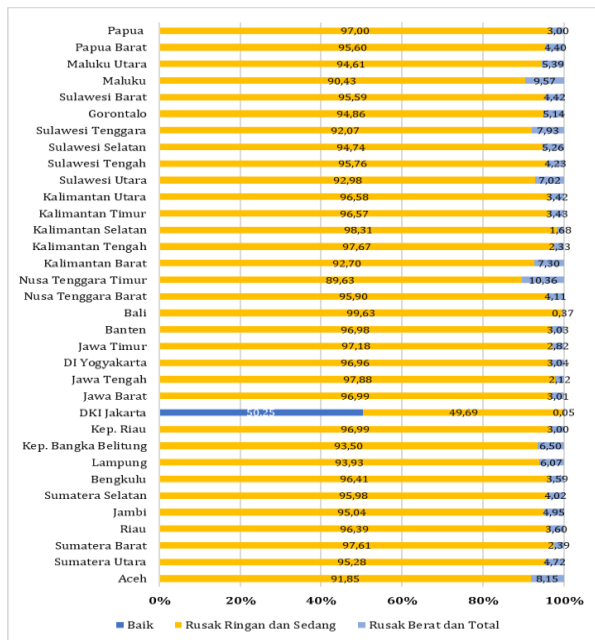


Sumber: Kemendikbud, 2020

Namun, dalam kurun waktu 5 tahun, kondisi sarana dan prasarana ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan justru mengalami penurunan. Berdasarkan data dari Kemendikbud pada tahun 2020, ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang SD rata-rata hanya mencapai 15,68 persen. Sementara untuk jenjang SMP, ruang kelas dengan kondisi baik hanya sebesar 17,99 persen, kemudian 29,20 persen untuk jenjang SMK, dan hampir tidak ada ruang kelas dengan kondisi baik untuk jenjang SMA. Jika dilihat persebarannya, rata-rata ruang kelas dengan kondisi baik di Pulau Jawa dan Bali hanya sebesar 15,69 persen untuk jenjang SD, Pulau Sumatera hanya 15,10 persen, dan 14,33 persen untuk Pulau Kalimantan dan KTI (Gambar 15). Untuk jenjang SMP, ruang kelas dengan kondisi baik di Pulau Jawa dan Bali hanya mencapai rata-rata 24,56 persen,

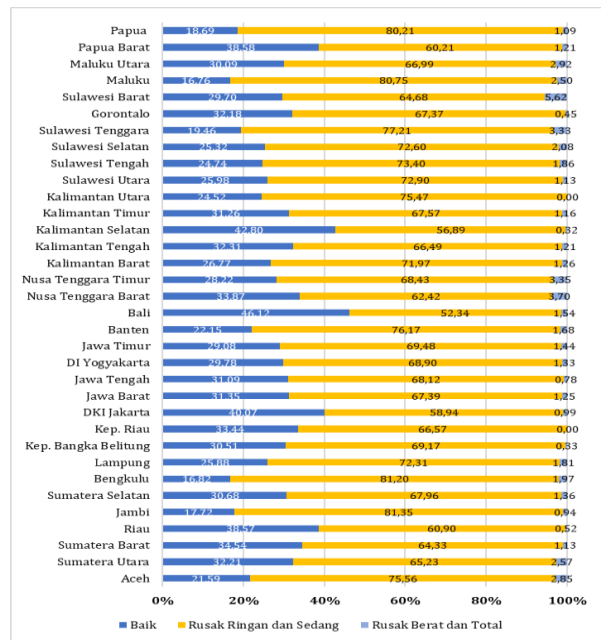
Pulau Sumatera sebesar 17,09 persen, serta untuk Pulau Kalimantan dan KTI sebesar 15,82 persen (Gambar 16). Ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang SMK di Pulau Jawa dan Bali rata-rata sebesar 32,81 persen, Pulau Sumatera hanya 28,20 persen, serta untuk Pulau Kalimantan dan KTI rata-rata sebesar 28,31 persen (Gambar 18). Sayangnya, untuk jenjang SMA ruang kelas dengan kondisi baik hanya ada di Provinsi DKI Jakarta, seperti yang terlihat pada Gambar 17.

**Gambar 17.** Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SMA Per Provinsi Tahun 2020



Sumber: Kemendikbud, 2020

**Gambar 18.** Kondisi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan SMK Per Provinsi Tahun 2020



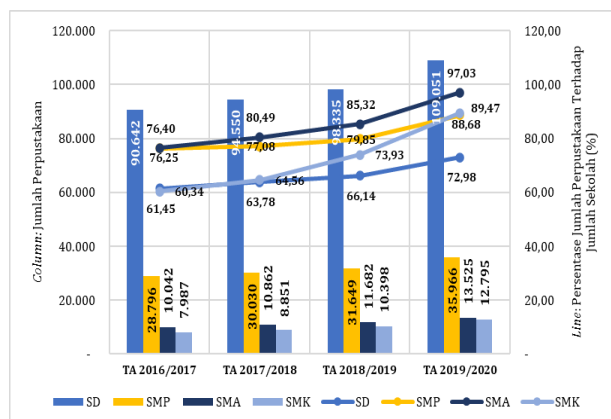
Sumber: Kemendikbud, 2020

Sementara itu, ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/sedang justru mengalami peningkatan pada tahun 2020. Lebih dari 70 persen ruang kelas pada setiap jenjang pendidikan kondisinya rusak ringan/sedang. Ruang kelas dengan kondisi rusak sedang/ringan untuk jenjang SD mencapai 75,74 persen dan untuk jenjang SMP mencapai 76,08 persen (Gambar 15 dan Gambar 16). Kemudian, ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/sedang pada jenjang SMK sebesar 69,16 persen (Gambar 18). Di sisi lain, ruang kelas dengan kondisi rusak berat/total mengalami penurunan pada tahun 2020 untuk setiap jenjang pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi rusak berat/total pada jenjang SD hanya sebesar 8,58 persen, sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK masing-masing sebesar 5,93 persen, 4,42 persen, dan 1,64 persen.

Selain ruang kelas, sarana perpustakaan sekolah juga merupakan salah satu sarana penting dalam proses belajar mengajar. Peserta didik diharapkan dapat memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat sumber informasi, sehingga pengetahuannya luas dan berkualitas. Walaupun jumlah perpustakaan pada setiap jenjang pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya (Gambar 19), namun masih terdapat sekolah yang tidak memiliki atau belum dilengkapi dengan perpustakaan. Hal ini tergambar dari persentase perpustakaan terhadap sekolah untuk setiap jenjang pendidikan secara umum masih

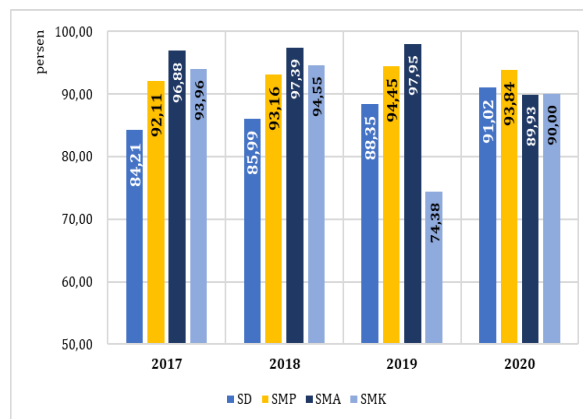
berada di bawah 100 persen. Hanya pada jenjang SMA dimana persentase perpustakaan terhadap ruang kelas yang hampir mencapai angka 100 persen pada tahun 2020.

**Gambar 19.** Perkembangan Jumlah Perpustakaan dan Persentasenya terhadap Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan TA 2016-2020



Sumber: BPS, berbagai tahun

**Gambar 20.** Perkembangan Persentase Guru Layak Mengajar Menurut Jenjang Pendidikan 2017-2020



Sumber: BPS, 2020

Kualitas guru juga merupakan salah satu sarana dan prasarana yang tak kalah penting dalam proses belajar mengajar. Salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk melihat kualitas guru adalah kualifikasi akademik/ijazah dari guru. Guru layak mengajar menurut Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah minimum Diploma Empat (D4) atau Sarjana (S1). Berdasarkan publikasi BPS pada Statistik Pendidikan 2020, jumlah guru layak mengajar mengalami peningkatan setiap tahunnya untuk jenjang pendidikan SD dan SMP (Gambar 20). Sedangkan untuk jenjang SMK, walaupun persentase guru layak mengajar sempat menurun pada tahun 2019, namun mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020. Sementara untuk persentase guru layak mengajar pada jenjang SMA justru mengalami penurunan pada tahun 2020. Menurut BPS, penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh adanya sejumlah guru yang memasuki masa pensiun atau sudah tak mengajar.

#### IV. Kesimpulan

1. Realisasi anggaran pendidikan secara umum terus mengalami peningkatan selama 1 dekade terakhir, terutama pada pos belanja pemerintah pusat dan TKDD. Hal ini menunjukkan makin tingginya komitmen pemerintah terhadap perbaikan kinerja sektor pendidikan di Indonesia. Meskipun *mandatory spending* alokasi anggaran pendidikan secara umum sudah mencapai 20 persen, namun rasio untuk realisasi anggarannya belum sampai 20 persen dari total belanja, terutama untuk 3 tahun terakhir.
2. Secara garis besar, potret kinerja pendidikan Indonesia dari segi aksesibilitas mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari tren peningkatan indikator pendidikan seperti APM, APS, RLS, dan HLS. Namun, apabila dilihat dari kualitasnya, kinerja



pendidikan Indonesia justru mengalami penurunan, yang salah satunya terlihat dari skor PISA yang menurun selama 2 periode terakhir.

3. Dari segi sarpras, kondisi ruang kelas juga mengalami tren penurunan pada setiap jenjang pendidikan. Misalnya, ruang kelas dengan kondisi baik yang persentasenya justru menurun dalam kurun waktu 5 tahun dan ruang kelas dengan kondisi rusak ringan/sedang juga mengalami peningkatan. Untuk sarpras perpustakaan, walaupun jumlahnya selalu meningkat setiap tahunnya, namun persentase perpustakaan terhadap jumlah sekolah belum 100 persen. Sementara untuk guru layak mengajar, pada setiap jenjang pendidikan masih mengalami tren fluktuatif dalam 4 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya urgensi bagi pemerintah untuk berfokus meningkatkan kinerja sektor pendidikan, terutama dari segi kualitas pendidikan dan kondisi sarpras pendidikan yang masih belum menunjukkan progres yang menjanjikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2020. *[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2019-2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak Yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Menurut Provinsi 2018-2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kelompok Pengeluaran 2018-2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ Sederajat Menurut Kelompok Pendapatan 2018-2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Indikator Pendidikan 1994-2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur  $\geq$  15 Tahun Menurut Provinsi 2018-2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2016-2020*.
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Provinsi 2018-2020*.
- Kementerian Keuangan. 2019. *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019-2020*.
- Kementerian Keuangan. 2021. *Anggaran Pendidikan*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Profil Anak Indonesia 2016-2019*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021. *Data Pendidikan: Kondisi Ruang Kelas*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. *Pendidikan di Indonesia: Belajar Dari Hasil PISA 2018*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022: Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*.
- OECD. 2018. *PISA Results from PISA 2018: Indonesia Country Note*.
- Sulistyoningrum, Yulianisa. 2015. *Ini Penyebab Anggaran Pendidikan Turun dalam R-APBN 2016*.  
Bisnis.com. Diakses melalui  
<https://kabar24.bisnis.com/read/20150819/255/463677/ini-penyebab-anggaran-pendidikan-turun-dalam-r-apbn-2016>.



# **PUSAT KAJIAN ANGGARAN BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

**JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635**

**[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)**



**puskajianggaran**

**EMAIL: [puskaji.anggaran@dpr.go.id](mailto:puskaji.anggaran@dpr.go.id)**